



Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Persepsi Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun

Ariati Winda Ningtias

ariatiwindan@gmail.com

Mujilan

agusmujilan@gmail.com

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh faktor keperilakuan organisasi yang meliputi kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pelatihan terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun yang berjumlah 117 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa faktor keperilakuan organisasi yang meliputi kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.

Kata Kunci : Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan, Pelatihan, Persepsi Kegunaan, Sistem Akuntansi, Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pelaporan ke pemerintah pusat meskipun sudah melaksanakan otonomi daerah yang bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dibantu dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Laporan keuangan di tiap-tiap daerah dituntut untuk memenuhi prinsip transparan dan akuntabel. Hal ini untuk mendorong terwujudnya *Good Governance*, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Realitanya banyak kendala dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik seperti masalah yang dikutip dari Beritagar.id tanggal 03 Oktober 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester I 2018. Di dalamnya BPK melaporkan temuan sebanyak 15.773 permasalahan senilai Rp11,55 triliun dalam pemeriksaan yang dilakukan selama enam bulan awal tahun 2018. IHPS I Tahun 2018 ini merupakan ikhtisar dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Permasalahan ini meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai

Rp1,49 triliun. Permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian senilai Rp2,34 triliun, potensi kerugian senilai Rp1,03 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp6,69 triliun.

Melihat realita yang ada yaitu lemahnya sistem pengendalian intern dan perubahan-perubahan regulasi, maka hal ini terlihat jelas bahwa pengoptimalan sistem sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah. Sistem ini kegunaannya akan lebih optimal jika diimbangi dengan faktor pendukung lainnya. Persepsi Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ini dipengaruhi oleh faktor berperilaku organisasi yang meliputi kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pelatihan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yulistia dkk (2017) diterapkan pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dilakukannya penelitian yaitu di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.

TELAAH TEORIDAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara umum, kewenangan pemerintah daerah mencakup semua urusan dalam pemerintah, kecuali urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah, menurut UU No. 23 Tahun 2014, ada kewenangan yang bersifat wajib dan yang bersifat pilihan. Kewenangan bersifat wajib maksudnya adalah yang mencakup semua urusan pemerintahan dalam ukuran daerah. Sementara kewenangan yang bersifat pilihan adalah meliputi segala urusan pemerintah yang secara nyata ada serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Keuangan Daerah

Menurut Solihin (2004 : 379) dalam Andira (2015), Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (2006:76) yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.

Persepsi Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Davis (1993) persepsi kegunaan sistem informasi (*Perceived usefulness*) merupakan sejauh mana seorang individu percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya (*perceived usefulness is the degree to which an individual believes that using a particular system would enhance his or her job performance*).

Faktor Keperilakuan Organisasi

Menurut Tampubolon (2004) dalam Mranani dan Beti (2011), mengungkapkan perilaku keorganisasian merupakan studi mengenai perilaku manusia dalam organisasi yang mana dengan menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia bertindak dalam organisasi. Faktor Keperilakuan Organisasi diprosikan dengan kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pelatihan.

Pengaruh kejelasan tujuan terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah

Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Kejelasan tujuan dapat dijelaskan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya sistem akuntansi keuangan daerah di semua level organisasi selain dan dapat diartikan suatu keadaan yang jelas terhadap arah yang dapat menentukan suatu keberhasilan sistem dan target yang dituju (Latifah dan Sabeni, 2007). Kejelasan tujuan suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut penelitian Yulistia dkk (2017) membuktikan bahwa variable kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Yati (2014) yang membuktikan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa kejelasan tujuan mendukung sepenuhnya terhadap kegunaan sistem informasi keuangan daerah. Kejelasan tujuan diartikan ketika akan mengimplementasikan SAKD, tujuan implementasi SAKD tersebut telah dijelaskan dan disepakati. Implementasi SAKD akan berhasil apabila tujuandari implementasi SAKD telah dijelaskan dan telah disepakati serta SAKD bermanfaat untuk semua bagian dalam SKPD tersebut. Faktor kejelasan tujuan mendorong manajer untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan akan operasional aplikasi SAKD dan terlibat dalam suatu interaksi yang memfokuskan pada tugas untuk mengimplementasikan SAKD secara efektif.

H1: Kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah

Pengaruh dukungan atasan terhadap persepsi kegunaan sistem informasi keuangan daerah

Dukungan atasan merupakan dukungan dari atasan (Pemda) untuk menyediakan sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi SAKD, dan hubungannya dengan kemajuan dan efisiensi. Menurut (Chenhall, 2004 dalam Yati, 2014) mengungkapkan bahwa dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan penyediaan sumberdaya yang diperlukan. Dukungan atasan dalam kegunaan sistem akuntansi keuangan di dalam suatu organisasi tentu harus diimbangi dengan kemampuan dan skill dari anggota organisasi dalam menjalankan suatu sistem. Oleh karena itu seorang pimpinan sangat

mendukung berbagai aktifitas yang dapat menambah kemampuan organisasi dalam menjalankan suatu sistem.

Menurut penelitian Yulistia dkk (2017) membuktikan bahwa variable dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Yati (2014) membuktikan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif dengan kegunaan SAKD. Dukungan atasan merupakan dukungan dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk implementasi SAKD dan hubungannya dengan kemajuan dan efisiensi. Dukungan atasan dalam mengoptimalkan SAKD dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan strategis khususnya berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

H2: Dukungan atasan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah

Pengaruh pelatihan terhadap persepsi kegunaan sistem informasi keuangan daerah

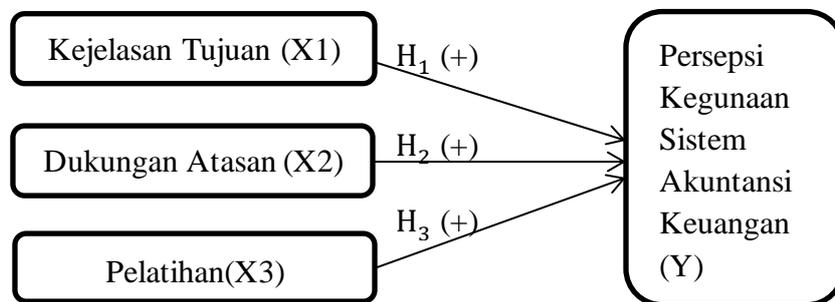
Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem (Chenhall, 2004 dalam Latifah dan Sabeni, 2007). Secara umum tujuan suatu pelatihan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan serta untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap karyawan yang ada dan diharapkan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kebutuhan perusahaan. Pelatihan digunakan untuk lebih meningkatkan hasil pekerjaan baik sekarang atau yang akan datang, serta dapat memperbaiki efisiensi dan efektifitas kerja karyawan untuk mencapai tujuannya.

Menurut penelitian Yulistia dkk (2017) membuktikan bahwa variabel Pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian Yati (2014) membuktikan bahwa pelatihan berpengaruh positif dengan kegunaan SAKD. Pelatihan berkaitan dengan implementasi, Design dan penggunaan SAKD, dapat memberikan mekanisme bagi pengguna untuk memahami dan menerima dasar dari SAKD.

H3: Pelatihan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah

Model Penelitian

Berdasarkan uraian teori di atas maka kerangka teori yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini menguji adanya pengaruh variabel independen yaitu kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pelatihan terhadap variabel dependen yaitu persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang akan menguji hipotesis tentang pengaruh faktor berperilaku yaitu kejelasan tujuan, dukungan atasan, pelatihan terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Desain penelitian ini termasuk dalam desain kausal yang menyoroti hubungan antar variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis-hipotesis yang dirumuskan. Fokus unit penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi dinas dan badan di pemerintahan Kota Madiun. *Setting* penelitian dalam penelitian ini adalah lapangan. Dimensi waktu data bersifat *cross section* yaitu pengambilan data pada waktu tertentu dengan banyak sampel.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun yang berjumlah 167 pegawai. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memenuhi kriteria tertentu (*Purposive Sampling*). Adapun kriteria tersebut adalah hanya pada pegawai bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun yang memiliki masa kerja minimal satu tahun.

Menurut Sugiyono (2015) menyatakan bahwa menghitung jumlah sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya dapat dihitung menggunakan rumus dari *Isaac* dan *Michael* dengan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Pada penelitian ini tingkat kesalahan atau *sampling error* dalam menentukan jumlah sampel yaitu pada tingkat kesalahan 5%, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 117 pegawai atau sekitar 70% dari jumlah populasi pegawai yang menangani penyusunan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Kejelasan Tujuan (X1)

Menurut Nurlaela (2010) kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi. Kejelasan tujuan diukur sebagai kejelasan tujuan penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut para pegawai. Indikatornya sebagai berikut: Kejelasan dari tugas-tugas, kejelasan dari tujuan organisasi, memahami tujuan dari pekerjaan dan pencapaian tujuan. Untuk mengukur kejelasan tujuan maka digunakan 9 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Likert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah 1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5.

Dukungan Atasan (X2)

Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan (Chenhall, 2004 dalam Latifah dan Sabeni, 2007). Istilah manajer umumnya digunakan dalam suatu perusahaan, sedangkan manajer dalam suatu pemerintah biasanya disebut Kepala Dinas/Kepala Badan. Dukungan atasan didefinisikan secara operasional sebagai Keterlibatan Kepala Dinas/Kepala Badan dalam pengembangan sistem yaitu menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik. Indikatornya variable dukungan atasan sebagai berikut; Memberikan wewenang memberikan dukungan pada setiap keputusan melaksanakan pekerjaan dengan baik menghargai pendapat; kebebasan dalam mendiskusikan masalah kepercayaan kebebasan dalam berpendapat; perhatian dan menerima dukungan atasan. Untuk mengukur dukungan atasan maka digunakan 10 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Likert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah

1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5.

Pelatihan (X3)

Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem (Chenhall, 2004 dalam Latifah dan Sabeni, 2007). Variabel pelatihan diukur dari sisi kualitas, maka pelatihan didefinisikan secara operasional sebagai kualitas pelatihan yang dipersepsikan oleh para pegawai dalam rangka meningkatkan pemahaman sistem agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Indikatornya sebagai berikut: ketrampilan kerja, jenis pelatihan, pelatihan diberikan dengan jelas, cara-cara spesifik, fasilitas pelatihan, jenis pelatihan sesuai dengan bidang, pengembangan kemampuan dan pengarahan atau pelatihan. Untuk pengukuran pelatihan maka digunakan 9 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Likert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah 1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Sesuai (STS) = 1, Tidak Sesuai (TS) = 2, Netral (N) = 3, Sesuai (S) = 4, Sangat Sesuai (SS) = 5.

Persepsi Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)

Menurut Davis (1993) dalam Rahayu, Siti Kurnia, Ony Widilestariningtyas dan Adi Rachmanto (2015) persepsi kegunaan sistem informasi (*Perceived usefulness*) merupakan sejauh mana seorang individu percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya (*perceived usefulness is the degree to which an individual believes that using a particular system would enhance his or her job performance*). Indikator yang dipakai untuk mengukur variabel persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah kemudahan untuk dipelajari (*easy to learn*), kemudahan mencapai tujuan (*controllable*), jelas dan mudah dipahami (*clear and understabel*), fleksibel (*flexible*), bebas dari kesulitan (*easy become skillfull*), dan kemudahan penggunaan (*easy to use*) (Davis, 1989). Untuk mengukur persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah maka digunakan 5 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Likert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah 1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Sesuai (STS) = 1, Tidak Sesuai (TS) = 2, Netral (N) = 3, Sesuai (S) = 4, Sangat Sesuai (SS) = 5.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober - November 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada masing-masing variabel independen dan variabel dependen dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kejelasan Tujuan	100	33	45	39,30	3,086
Dukungan Atasan	100	37	50	42,45	3,770
Pelatihan	100	30	45	38,59	3,534
Persepsi Kegunaan SAKD	100	18	25	21,64	1,655

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui deskripsi masing-masing variabel, yaitu:

- Dari 100 responden, variabel kejelasan tujuan (X_1) memiliki nilai minimum 33; nilai maksimum 45; rata-rata 39,30 dan standar deviasi sebesar 3,086. Variabel kejelasan tujuan menggunakan 9 item pernyataan, sehingga rata-rata item 39,30 dibagi 9 item sama dengan 4,36 dari skala *likert* 1 sampai 5. Rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kejelasan tujuan penggunaan SAKD tergolong baik.
- Variabel dukungan atasan (X_2) memiliki nilai minimum 37; nilai maksimum 50; rata-rata 42,45 dan standar deviasi sebesar 3,770. Variabel dukungan atasan menggunakan 10 item pernyataan, sehingga rata-rata item 42,45 dibagi 10 item sama dengan 4,245 dari skala *likert* 1 sampai 5. Rata-rata tersebut menunjukkan bahwa dukungan atasan tergolong baik.
- Variabel pelatihan (X_3) memiliki nilai minimum 30; nilai maksimum 45; rata-rata 38,59 dan standar deviasi sebesar 3,535. Variabel pelatihan menggunakan 9 item pernyataan, sehingga rata-rata item 38,59 dibagi 9 item sama dengan 4,287 dari skala *likert* 1 sampai 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelatihan tergolong baik.
- Variabel persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y) memiliki nilai minimum 18; nilai maksimum 25; rata-rata 21,64 dan standar deviasi sebesar 1,655. Variabel persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan 5 item pertanyaan sehingga rata-rata item 21,64 dibagi 5 item sama dengan 4,328 dari skala *likert* 1 sampai 5. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah tergolong baik.

Uji Validitas

Hasil uji validitas masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig (2-tailed)	Keterangan
Kejelasan Tujuan (X1)	1	0,576	0,000	Valid
	2	0,620	0,000	Valid
	3	0,593	0,000	Valid
	4	0,514	0,000	Valid
	5	0,652	0,000	Valid
	6	0,668	0,000	Valid
	7	0,651	0,000	Valid
	8	0,754	0,000	Valid
	9	0,784	0,000	Valid
Dukungan Atasan (X2)	1	0,534	0,000	Valid
	2	0,589	0,000	Valid
	3	0,652	0,000	Valid
	4	0,639	0,000	Valid
	5	0,672	0,000	Valid
	6	0,565	0,000	Valid
	7	0,665	0,000	Valid
	8	0,717	0,000	Valid
	9	0,661	0,000	Valid
	10	0,635	0,000	Valid
Pelatihan (X3)	1	0,575	0,000	Valid
	2	0,636	0,000	Valid
	3	0,670	0,000	Valid
	4	0,671	0,000	Valid
	5	0,789	0,000	Valid
	6	0,704	0,000	Valid
	7	0,745	0,000	Valid
	8	0,693	0,000	Valid
	9	0,710	0,000	Valid

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig (2-tailed)	Keterangan
Persepsi Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	1	0,542	0,000	Valid
	2	0,773	0,000	Valid
	3	0,737	0,000	Valid
	4	0,576	0,000	Valid
	5	0,820	0,000	Valid

Berdasarkan tabel 2 hasil perhitungan validitas menunjukkan bahwa item pernyataan untuk variabel kejelasan tujuan, dukungan atasan, pelatihan dan persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dinyatakan semua valid karena mempunyai nilai *Sig (2-tailed)* kurang dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dari variabel kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pelatihan terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,60 sehingga semua variabel dapat dinyatakan reliabel. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3:

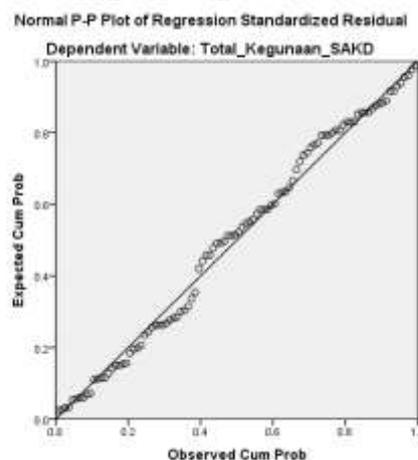
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah item pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kejelasan Tujuan	9	0,823	Reliabel
Dukungan Atasan	10	0,828	Reliabel
Pelatihan	9	0,861	Reliabel
Persepsi Kegunaan SAKD	5	0,721	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji normal *probability plot*. Dari jumlah 100 responden yang telah tercantum pada data kuesioner, dapat dilihat pada gambar 1 bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini terbukti karena titik-titik pada gambar diatas menyebar dan mengikuti diagonal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Uji Multikolinearitas

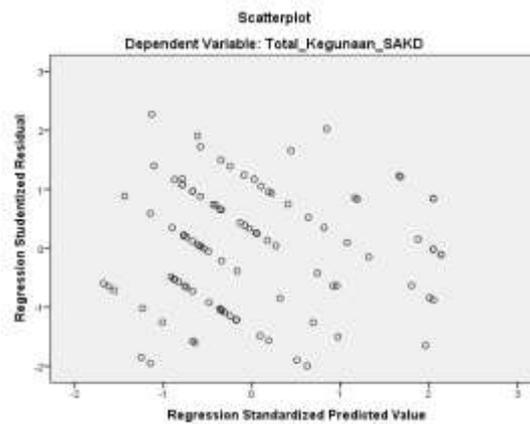
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
E-Kejelasan Tujuan (X ₁)	,614	1,629
E-Dukungan Atasan (X ₂)	,310	3,230
E-Pelatihan (X ₃)	,149	2,921

Dari tabel 4 hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai *tolerance* untuk variabel kejelasan tujuan (X₁) sebesar 0,614; variabel dukungan atasan (X₂) sebesar 0,310; variabel pelatihan (X₃) sebesar 0,149. Sedangkan nilai VIF untuk variabel kejelasan tujuan (X₁) sebesar 1,629; variabel dukungan atasan (X₂) sebesar 3,230; variabel pelatihan (X₃) sebesar 2,921. Dari hasil tersebut dapat dilihat nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola tertentu pada *scatterplot* dapat dilihat pada gambar 2. Berdasarkan gambar *scatterplot* tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi di SPSS pada tabel 5:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.704 ^a	.495	.479	1.194	.495	31.369	3	96	.000	2.067

a. Predictors: (Constant), Total_Pelatihan, Total_Kejelasan_Tujuan, Total_Dukungan_Aatasan

b. Dependent Variable: Total_Kegunaan_SAKD

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* pada model regresi adalah sebesar 2,067 dengan level signifikansi 0,05 (5%) dengan jumlah observasi sebanyak (N) 100 dan $k=3$ diperoleh nilai dU sebesar 1,7364 maka $dU < DW < (4-dU)$ adalah $1,7512 < 2,067 < 2,2636$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model persamaan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Hasil uji regresi linier berganda disajikan pada tabel 6 :

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Unstandardized</i>	T	Sig.	Keterangan
	<i>Coefficients</i>			
	B			
Konstanta	6,607	4,027	0,000	
Kejelasan Tujuan	0,103	2,075	0,041	Signifikan
Dukungan Atasan	0,151	2,633	0,010	Signifikan
Pelatihan	0,119	2,050	0,043	Signifikan

Berdasarkan tabel 6, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 6,607 + 0,103X_1 + 0,151X_2 + 0,119X_3 + e$

Berdasarkan persamaan di atas, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 6,607 menyatakan apabila variabel kejelasan tujuan (X_1), dukungan atasan (X_2), pelatihan (X_3) dianggap konstan, maka persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di OPD Kota Madiun sebesar 6,607.
- Koefisien regresi kejelasan tujuan (X_1) sebesar 0,103 bernilai positif yang berarti bahwa kejelasan tujuan mempunyai pengaruh yang searah terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di OPD Kota Madiun. Artinya apabila kejelasan tujuan mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menyebabkan persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di OPD Kota Madiun naik sebesar 0,103.
- Koefisien regresi dukungan atasan (X_2) adalah 0,151 bernilai positif yang berarti bahwa dukungan atasan mempunyai pengaruh yang searah terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di OPD Kota Madiun. Artinya apabila dukungan atasan mengalami kenaikan satu satuan, maka menyebabkan persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di OPD Kota Madiun naik sebesar 0,151.
- Koefisien regresi pelatihan (X_3) adalah 0,119 bernilai positif yang berarti bahwa pelatihan mempunyai pengaruh yang searah terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di OPD Kota Madiun. Artinya apabila pelatihan mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menyebabkan persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di OPD Kota Madiun naik sebesar 0,119.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan tabel 5 diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,479. Persepsi Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu kejelasan tujuan, dukungan atasan, dan pelatihan sebesar 47,9%. Sedangkan sisanya 52,1% (100% - 47,9%) dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk variabel kejelasan tujuan sebesar 2,075 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 (Sig. < 0,05). Hal ini berarti variabel kejelasan tujuan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk variabel dukungan atasan sebesar 2,633 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 (Sig. < 0,05). Hal ini berarti variabel dukungan atasan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk variabel pelatihan sebesar 2,050 dengan nilai signifikansi sebesar 0,043 (Sig. < 0,05). Hal ini berarti variabel pelatihan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 7:

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	134.170	3	44.723	31.369	.000 ^b
	Residual	136.870	96	1.426		
	Total	271.040	99			

a. Dependent Variable: Total_Kegunaan_SAKD

b. Predictors: (Constant), Total_Pelatihan, Total_Kejelasan_Tujuan, Total_Dukungan_Aatasan

Berdasarkan hasil Uji F dari tabel 7 diketahui F hitung sebesar 31,369 dan nilai signifikansi 0,000 (Sig. < 0,05), hal ini berarti variabel kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Pembahasan

Dari hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka pembahasannya adalah sebagai berikut:

H₁: Kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil output SPSS pada tabel 6 menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk variabel kejelasan tujuan sebesar 2,075 dan nilai signifikansi sebesar 0,041 (Sig. < 0,05). Hal ini berarti variabel kejelasan tujuan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan tujuan penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempengaruhi persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempersepsikan kejelasan tujuan memiliki pengaruh dalam mencapai tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Semakin jelas tujuan penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan semakin tinggi pula persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan sebaliknya semakin kurang jelas kejelasan tujuan di kalangan pegawai maka semakin rendah persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Adanya suatu kejelasan tujuan, sasaran yang jelas dan pemahaman tentang bagaimana mencapai tujuan dapat menentukan keberhasilan

sistem sehingga pegawai dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian jelas tidaknya kejelasan tujuan mempengaruhi persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Yulistia dkk. (2017) membuktikan bahwa variabel kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sama seperti penelitian Cyntia (2013) tentang Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Pada Dinas di Pemerintah Kota Padang).

H₂: Dukungan atasan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil output SPSS pada tabel 6 menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk variabel dukungan atasan sebesar 2,633 dan nilai signifikansi sebesar 0,010 (Sig. < 0,05). Hal ini berarti variabel dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa H₂ diterima.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dukungan atasan memiliki peran penting dalam mempengaruhi persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di kalangan pegawai. Dalam hal ini dukungan atasan mendorong para pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan baik terkait dukungan dalam pengembangan sistem.

Semakin tinggi tingkat dukungan atasan, maka persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat dukungan atasan, maka semakin rendah persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Penelitian Yulistia dkk (2017) yang membuktikan bahwa variabel dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pembuktian yang sama seperti penelitian Yati (2014).

H₃: Pelatihan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil output SPSS pada tabel 6 menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk variabel pelatihan sebesar 2,050 dan nilai signifikansi sebesar 0,043 (Sig. < 0,05). Hal ini berarti variabel pelatihan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa H₃ diterima.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelatihan mempunyai peran penting dalam mempengaruhi persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di kalangan pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kota Madiun. Secara tidak langsung persepsi pegawai mengenai pelatihan memiliki pengaruh dalam meningkatkan pemahaman dan pengembangan kemampuan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Semakin baik tingkat pelatihan maka akan semakin tinggi pula persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan sebaliknya semakin buruk tingkat pelatihan maka semakin rendah persepsi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Dengan demikian baik buruknya kualitas pelatihan mempengaruhi kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Yulistia dkk (2017) dan Yati (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelatihan memiliki pengaruh terhadap kegunaan sistem informasi keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil uji hipotesis tentang pengaruh kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pelatihan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil uji statistik t, kejelasan tujuan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,041 (Sig. < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.
- Berdasarkan uji statistik t, dukungan atasan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 (Sig. < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.
- Berdasarkan uji statistik t, pelatihan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,043 (Sig. < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun

Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini, diantaranya:

- Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penelitian ini hanya dilihat dari tiga variabel yaitu variabel kejelasan tujuan, dukungan atasan, dan pelatihan.
- Responden penelitian ini terbatas hanya menggunakan pegawai bagian keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Madiun dan sebagian besar pegawai memiliki intensitas pekerjaan yang tinggi.

Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas, peneliti selanjutnya disarankan untuk:

- Penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel penelitian lain yang mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti variabel kemajuan teknologi, pendidikan pengguna SAKD dan pengalaman.
- Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas obyek penelitian dengan mempertimbangkan responden bagian lain yang merasakan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah agar lebih memberikan gambaran yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, Cyntia. 2013. Pengaruh Kejelasan Tujuan Dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Pada Dinas di Pemerintah Kota Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Davis, F. D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, *MIS Quarterly* 13 (3): 319–340, doi:10.2307/249008
- Dewanti, Andira. 2015. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi). Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Fatimah. 2013. Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak dan Kejelasan Tujuan Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPKAD Kota di Sumatera Barat). Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Ghozali, I. 2005. *Model Persamaan Struktural*. Semarang: UNDIP.

<https://berita.gar.id/artikel/berita/bpk-temukan-permasalahan-rp115-triliun-pada-semester-i> diakses tanggal 29 Maret 2019 Pukul 20.00 WIB

Kayati. 2016. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Universitas Negeri Semarang.

Latifah, Lyna, & S. Arifin. (2007). Faktor keprilaku organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Makassar: SNA X.

Mranani, Muji dan Beti Lestiorini. 2011. Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kognitif dan Konflik Afektif Sebagai Intervening. Fokus Ekonomi. Magelang, 10(3), 193-203.

Nurlaela, Siti dan Rahmawati. (2010). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 13*. Universitas Islam Batik dan Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rahayu, Siti Kurnia, Ony Widilestariningtyas, dan Adi Rachmanto. 2015. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) Atas Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (Survey Pada Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah). *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 13(1), 3-12.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Yati. 2014. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Pada Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar). *GEMA TH. XXVI/47*, 1271-1280. Universitas Sebelas Maret.

Yulistia, Novi Yanti, dan Ika Purwasih. 2017. Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Benefita Kopertis Wilayah X*, 2(3), 179-193.



Hak Kopy (*copy right*) atas Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi ada pada penerbit dengan demikian isinya tidak diperkenankan untuk dikopi atau di-*email* secara masal atau dipasang diberbagai situs tanpa ijin tertulis dari penerbit. Namun demikian dokumen ini dapat diprint diunduh, atau di-*email* untuk kepentingan atau secara individual.